

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019
(BAHAN ACARA NOMOR. 10 TAHUN 2020)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan Lainnya

Yth. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala BPKA DIY

Yth. Ketua Ketua Fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati Rekan-rekan pers, media masa, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberi waktu kepada kami untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2020.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan penghantaran rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 3 Juni 2019 yang lalu. Hal ini sebagai bentuk kewajiban kepala daerah sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 ayat 1 yang mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati,

Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya kepada Pimpinan Dewan. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat konsultasi antara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi fraksi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 dan dilanjutkan dalam rapat kerja Badan Anggaran pada tanggal 4 Juni 2020, bahwa rangkuman Pemandangan Umum Fraksi-fraksi akan dibacakan oleh Pimpinan Dewan pada saat rapat Paripurna. Adapun Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 disampaikan sebagai berikut :

1. Atas pemeriksaaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda DIY, ada berapa temuan dan bagaimana tindaklanjutnya? serta langkah apa yang diambil Pemda DIY agar temuan yang sama tidak terulang dikemudian hari? (pertanyaan ini disampaikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Nasdem PSI PD)
2. Mohon dapat dijelaskan rencana pemanfaatan SILPA tahun 2019? (disampaikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Nasdem PSI PD)
3. Atas keinginan eksekutif untuk merubah Perda tentang RPJMD, maka mohon dapat dijelaskan secara singkat subsanti apa yang akan dirubah? (disampaikan oleh Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar)
4. Mohon penjelasan penyerapan belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hanya mencapai 80,16 % (disampaikan oleh Fraksi PKS)
5. Mohon penjelasan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan seperti program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan berapa capaian penurunan yang dicapai pada tahun 2019 dalam mengurangi angka kemiskinan di DIY? (disampaikan oleh Fraksi PKS).
6. Mohon penjelasan langkah optimalisasi pendapatan dari BUMD. (disampaikan oleh Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra)
7. Aset Pemerintah DIY per 31 Desember 2019 sebesar Rp 10,384 Trilyun. Yang terdiri aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang dan aset lainnya. Mohon penjelasan nilai tambahan aset dalam satu tahun yakni 2019? Seperti diketahui

- nilai belanja modal di realisasikan sebesar Rp 1,035 Triliyun. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam optimalisasi aset daerah dalam rangka peningkatan PAD? (disampaikan oleh Fraksi PAN)
8. Bagaimana status aset yang didanai dari anggaran keistimewaan? Apakah menjadi milik pemda DIY atau menjadi aset kasultanan/ kadipaten sebagai badan hukum? (disampaikan oleh Fraksi PAN)
9. Belanja subsidi pada tahun 2019 di anggarkan sebesar 81,1 Milyar dan realisasi 76,067 milyar? Jumlah ini cukup besar mengingat bahwa pendapat dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar 85,997 milyar. Mohon penjelasan untuk jenis subsidi yang diberikan kepada masyarakat berupa apa saja? Dan apakah belanja subsidi tersebut dilakukan setiap tahun atau hanya bersifat insidental? (disampaikan oleh Fraksi PAN)
10. Banyak wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terlambat untuk membayar pajak karena berbagai alasan. Berapa nilai tunggakan pajak yang ada? Apakah tidak ada upaya untuk melakukan penghapusan denda atau berbagai insentif bagi wajib pajak mengingat bahwa beban masyarakat semakin meningkat apalagi sebagai dampak dari Covid-19 seperti yang terjadi dalam hari-hari ini? (disampaikan oleh Fraksi PAN)
11. Mengusulkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk ditingkatkan agar mencapai target. Selain itu juga memberikan masukan agar dilakukan perluasan pengembangan usaha berbasis teknologi dan informasi (disampaikan oleh Fraksi PKB)
12. Bahwa kemampuan keuangan daerah pada Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.978.131.574.404,65 (Lima Triliyun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Koma Enam Puluh Lima Rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 5.544.876.462.030,02, (Lima Triliyun Lima Ratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Koma Nol Dua Rupiah) sehingga surplus Rp. 433.481.144.074,63 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Koma Enam Puluh Tiga Rupiah). Dengan adanya surplus tersebut tentunya kedepan dalam penyusunan anggaran belanja daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam pelaksanaan anggaran belanja juga dilakukan sinkronisasi dan

- harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai payung hukumnya. (disampaikan oleh Fraksi PKB)
13. Pelaporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu F-PKB menganggap informasi ini penting dan harus jelas. Hal ini kami sampaikan mengingat bahwa dalam penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 ditulis dengan pembulatan. Salah satu contoh berdasarkan penjelasan Gubernur bahwa Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp 420,568 milyar, namun dalam pasal 7 huruf f Raperda tertulis bahwa Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019 Rp. 420.567.958.995,42. (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Empat Puluh Dua Rupiah) Dalam hal ini F-PKB memberi masukan agar kedepan nantinya dalam penulisan pelaporan keuangan diselaraskan. Mohon Tanggapan.
14. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan (disampaikan oleh Fraksi PKB)
15. secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2019 (BA. 10 tahun 2020) berpendapat dari paparan *REALISASI* perangkatan yang ada dalam Rancangan ini, kami berharap ada keterkaitan angka-angka tersebut, dengan **Tema sentral** yang di usung, berikut **capaian** skala prioritas Pembangunan. Karena, dalam pidato penjelasan, kami belum menemukan petunjuk atau kesimpulan yang bisa ditangkap dari paparan Pidato Penghantaran Gubernur, apakah APBD DIY 2019 sudah benar sesuai dengan **Tema, aspirasi dan progress**, yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2019 yang lalu, atau hanya berkutat secara teknis-akuntansi dengan **Perangkaan** semata yang telah ditampilkan, tapi tidak menyentuh **essensi dan tujuan utama** APBD 2019 tersebut. Dalam hal ini Mohon Sdr. Gubernur, berkenan memberikan penjelasan? (disampaikan oleh Fraksi Nasdem PSI PD)
16. Fraksi Nasdem-PSI-PD ingin mengkonfirmasi kepada Sdr. Gubernur, bagaimana sdr. Gubernur dapat memastikan **secara faktual** bahwa Anggaran Belanja **sebesar 5,978 Triliyun** itu benar-benar sudah sesuai, menyentuh tujuan

dan sasaran pembangunan yang sebenarnya, Apa parameter yang digunakan, selain langkah prosedur administratif yang sudah sdr. Gubernur sebutkan dalam Laporan

17. Fraksi NasDem-PSI-PD Meminta Penjelasan Sdr. Gubernur, khususnya terhadap 4 IKU (Indikator Kinerja Utama), mengapa ke 4 hal tersebut, tidak mencapai target yang diharapkan, padahal ke 4 IKU tersebut, merupakan **issue sentral** dan rawan gejolak sosial. Demikian juga antara pertumbuhan Ekonomi daerah, yang terkesan tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan dan serapan tenaga kerja, mohon penjelasannya?
18. Berkenaan dengan penanganan covid-19 selama ini, kami mohon ada peningkatan koordinasi dengan kabupaten/ kota dan pihak pihak lain sehingga ketidakmulusan penyaluran jadup bisa diminimalisir. Sekaligus mohon penjelasan tahapan pemberlakuan new normal (disampaikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Golkar)
19. Seluruh Fraksi menyepakati bahwa Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019 diterima dan dilakukan pe,mbahasan lebih lanjut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dan Komisi- Komisi DPRD DIY.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati,

Demikian rangkuman pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2019. Bersama ini pula kami lampirkan dokumen asli Pemandangan Umum masing masing Fraksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Atas segala perhatiannya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2020

Juru Bicara Pimpinan DPRD DIY



Suharwanta ST